

Serikat Buruh KSPI Ungkap 4 Kebohongan Anies-Sandi

<https://metro.tempo.co/read/1031960/serikat-buruh-kspi-ungkap-4-kebohongan-anies-sandi?PilihanUtama&campaign=PilihanUtama> Click 2

Reporter: M Yusuf Manurung

Editor: Jobpie Sugiharto

Rabu, 8 November 2017 17:29 WIB



Said Iqbal, Presiden KSPI dan FSPMI. Tempo/Jati Mahatmaji

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuding Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ([Anies-Sandi](#)) sebagai pembohong.

"Anies-Sandi harus dihukum karena berbohong," kata Said Iqbal di Kantor DPP FSPMI-KSPI, Jalan Raya Pondok Gede No 11, Kramatjati, Jakarta Timur, pada Rabu, 8 November 2017.

Menurut dia, pada 10 November mendatang sejumlah kelompok buruh akan unjuk rasa di Balai Kota DKI untuk menghukum secara moral dan sosial dengan mencabut mandat dari Anies-Sandi yang mereka berikan pada saat Pilkada 2017.

Baca: [Wartawan Kritik Anies-Sandi karena Tak Terbuka Seperti Era Ahok](#)

Demonstrasi buruh pada 10 November 2017 akan menuntut pemerintah pusat mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, revisi Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2018, serta menurunkan tarif listrik. Acara akan digelar mulai pukul 10.00 WIB di Balai Kota DKI lalu sebagian menuju Istana Negara. Said mengklaim mampu menghadirkan 8-12 ribu orang dari total 20 ribu orang yang direncanakan.

Menurut Said Iqbal, ada empat kebohongan yang dilakukan Anies-Sandi terhadap buruh. Kebohongan pertama Anies-Sandi, menurut dia, tentang penetapan Upah

Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3,6 juta. Pada masa kampanye Pilkada DKI 2017, Anies-Sandi dalam kontrak politik yang ditandatangani bersama Koalisi Buruh Jakarta berjanji menetapkan UMP di atas patokan dalam PP Nomor 78 Tahun 2015.

Buruh meminta UMP DKI sebesar Rp 3,9 juta berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan sidang Dewan Pengupahan yang telah mereka lakukan. "Kalau dia tidak sanggup tidak usah tanda tangan kontrak politik," ujar Said.

Akibat janji itu, Said mengatakan, sekitar 400 ribu anggota koalisi buruh Jakarta diperkirakan memilih Anies-Sandi. Angka tersebut bisa bertambah mencapai 1 juta jika ditambah dengan keluarga para buruh. "Ini bukan angka main-main."

Infografik: Janji-Janji Anies-Sandi Saat Kampanye

Kebohongan kedua, Said menerangkan, sebelum dirinya berangkat ke Jenewa untuk menghadiri acara International Labour Organization (ILO) Sandi berjanji membahas penetapan UMP bersama para pengusaha. Namun, pada 1 November 2017 Anies-Sandi langsung menetapkan UMP DKI 2018 tanpa menunggu kedatangan Said dan melibatkan para buruh. "Itu saja sudah berbohong," ucapnya.

Adapun kebohongan Anies-Sandi yang ketiga, menurut Said, menaikkan UMP sebesar Rp 300 ribu dengan janji memberikan fasilitas lain berupa gratis Transjakarta dan potongan belanja di PD Pasar Jaya. Said menuturkan, fasilitas tersebut sudah dimuat di Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 yang diterbitkan era Gubernur Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

"Itu Pergubnya Ahok, seolah-olah dia (Anies-Sandi) pahlawan," katanya.

Kebohongan keempat, pernyataan Sandi bahwa telah mengutus Rustam Effendi untuk membicarakan masalah UMP kepada para buruh, menurut Said Iqbal, tidak pernah terjadi. Rustam adalah bekas Wali Kota Jakarta Utara yang mengundurkan diri pada era Ahok dan kini menjadi anggota Staf Khusus Sandi.

Said menganggap [Anies-Sandi](#) adalah pemimpin yang hanya pandai berkata-kata. Buruh tidak butuh kesantunan dari Anies-Sandi, melainkan kejujuran. Maka dia menyatakan akan terus melakukan perlawanan terhadap Anies-Sandi. "Sampai kapan? Sampai dia penuh janji."

Menanggapi kekecewaan buruh, sebelumnya Sandiaga Uno sempat mengaku sedih dan terenyuh atas sikap sejumlah koalisi buruh. "Yah, ini yang kadang membuat sedih dan terenyuh, karena tentunya dalam pengambilan keputusan ini sudah mempertimbangkan berbagai faktor," ujar Sandiaga pada Kamis malam, 2 November 2017.

Sandi menuturkan, dirinya sudah berusaha mengambil jalan tengah. Menurut Sandi, survei kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta adalah Rp 3,1 juta dan sudah disepakati oleh dewan pengupahan.

[Anie](#) Read more at

https://metro.tempo.co/read/1031960/serikat-buruh-kspi-ungkap-4-kebohongan-anies-sandi?PilihanUtama&campaign=PilihanUtama_Click_2#Q8jIW5ObSQI5W83u.99

=====

<https://metro.tempo.co/read/1032011/buruh-kspi-punya-sebutan-khusus-buat-anies-sandi>

Buruh KSPI Punya Sebutan Khusus Buat Anies-Sandi

Reporter: M Yusuf Manurung

Editor: Jobpie Sugiharto

Rabu, 8 November 2017 19:37 WIB

<https://metro.tempo.co/read/1032011/buruh-kspi-punya-sebutan-khusus-buat-anies-sandi#iybaY96OR0ws1G4G.99>



Ketua Harian Komite Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi (Baju Putih) bersama perwakilan organisasi buruh lainnya memprotes UMP DKI yang dianggap terlalu rendah, di kantornya,

Jumat, 3 November 2017. Tempo/M. Yusuf Manurung

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan kekecewaannya terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno ([Anies-Sandi](#)).

Menurut Said, Jakarta, yang menjadi Ibu Kota Negara, mempunyai upah minimum provinsi (UMP) lebih rendah daripada Kota Bekasi, Jawa Barat. UMP Bekasi 2017 sudah menyamai UMP DKI 2018, yakni Rp 3,6 juta per bulan. Said juga menyebut UMP DKI yang dinilai lebih rendah daripada kota-kota besar lain di ASEAN, seperti Hanoi, Kuala Lumpur, Manila, Bangkok, dan Singapura.

Said bahkan mengatakan dia mempunyai sebutan khusus buat Anies-Sandi dalam hal pengupahan. "Bapak upah murah, karena keputusan Gubernur dan Wagub yang nilai upah minimumnya murah," katanya dalam konferensi pers di kantor DPP FSPMI-KSPI, Jalan Raya Pondok Gede Nomor 11, Kramatjati, Jakarta Timur, pada Rabu, 8 November 2017.

Sandiaga mengatakan sedih dan terenyuh atas sikap sejumlah koalisi buruh yang kecewa atas penetapan [UMP](#) DKI 2018. Serikat buruh menganggap besaran UMP Jakarta 2018 sebesar Rp 3,648 juta per bulan terlalu rendah.

Buruh pun menganggap Sandi dan Anies Baswedan mengingkari kontrak politik dengan buruh saat kampanye lalu. "Ya, ini yang kadang membuat sedih dan terenyuh," ujar Sandi pada Kamis malam, 2 November 2017. "Karena tentunya dalam pengambilan keputusan ini sudah mempertimbangkan berbagai faktor."

Sandiaga berujar sudah berusaha mengambil jalan tengah. Menurut dia, survei kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp 3,1 juta dan sudah disepakati Dewan Pengupahan. Angka yang dituntut serikat pekerja lebih tinggi daripada angka itu. Buruh berkeras pada angka Rp 3,6 juta. Angka itu berdasarkan hasil survei KHL yang mereka kerjakan sendiri.

Sebagai bentuk protes atas kebijakan [Anies-Sandi](#), KSPI bersama dengan organisasi buruh dari berbagai daerah akan melakukan unjuk rasa pada 10 November 2017 di Balai Kota Jakarta. Demonstrasi akan dilanjutkan ke Istana Negara untuk menuntut pemerintah pusat mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 serta meminta tarif listrik diturunkan.